

TEORI HARMONI

PENGANTAR KAJIAN SASTRA BERBASIS KONSTITUSI

Aprinus Salam
Universitas Gadjah Mada, aprinus@ugm.ac.id

ABSTRACT

Literary studies can not be separated from the literary theory initiated and developed by “Western” scholars. Indonesian Literature also refers to these theories in interpreting and explaining literary works. This paper intends to ask the historical contextuality and the theoretical independence of Indonesian literature as a nation that has a historicity different from the West. The main offer in this paper is the importance of a theory called the theory of harmony-constitution. The important objectives of the theoretical point of view of the theory of harmony-the constitution are 1) all efforts to build an independent society and social justice, 2) a happy and safe condition, and hence the freedom that has been achieved should always encourage unity, sovereignty and prosperity, and 3) the acknowledgment “on the blessings of almighty God and by the noble driven.” Methodologically, the theory of harmony-constitution is based on semantics. This theory can be used to analyze social and cultural issues, but in the case of this paper will be tested to study literary works, especially the poetry of Chairil Anwar.

Keywords: *literary studies, literary theory, Indonesian literature, harmony-constitution.*

ABSTRAK

Kajian kesastraan tidak bisa lepas dari teori sastra yang digagas dan dikembangkan para ilmuwan “Barat”. Kesastraan Indonesia pun merujuk teori-teori tersebut dalam menafsir dan menjelaskan karya sastra. Tulisan ini bermaksud mempersoalkan kontekstualitas historis dan kemandirian teoretis sastra Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki historisitas berbeda dengan Barat. Tawaran utama dalam tulisan ini adalah pentingnya suatu teori yang disebut teori harmoni-konstitusi. Hal yang menjadi tujuan penting dari cara pandang teoretik teori harmoni-konstitusi adalah 1) segala upaya membangun masyarakat yang merdeka dan berkeadilan sosial, 2) kondisi berbahagia dan selamat sentosa, dan dengan itu kemerdekaan yang telah diraih selayaknya selalu mendorong persatuan, kedaulatan, dan kemakmuran, dan 3) pengakuan “Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur.” Secara metodologis, teori harmoni-konstitusi ini berbasis pada semantik. Teori ini bisa dipakai untuk

menganalisis persoalan sosial dan budaya, tetapi dalam kasus tulisan ini akan diujikan untuk mengkaji karya sastra, khususnya puisi Chairil Anwar.

Kata Kunci: kajian sastra, teori sastra, sastra Indonesia, harmoni-konstitusi.

PENDAHULUAN

Teori sastra telah berkembang sedemikian rupa. Sejauh yang kita pelajari, teori-teori tersebut berkembang di Eropa dan Amerika. Teori-teori tersebut muncul dan berkembang dalam konteks kesejarahannya masing-masing. Kita tahu bahwa teori-teori tersebut telah sangat membantu kita untuk menafsirkan dan menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan realitas kesastraan Indonesia. Sebagai fakta (dan data), kesastraan modern kita juga berkembang karena faktor “Barat” tersebut. Dalam arti, kesastraan kita juga “berkiblat” pada Barat sehingga teori-teori yang kita pelajari menjadi “seolah” relevan.

Tulisan ini tidak bermaksud mempersoalkan hal yang telah berlangsung tersebut. Tulisan ini justru bermaksud mempersoalkan kontekstualitas historis dan kemandirian teoretis kita sebagai suatu bangsa yang memiliki historisitas yang berbeda dibanding negara-negara yang teorinya kita pelajari.

Diskusi dan polemik mencari basis “pribadi mengindonesia” itu telah lama dibicarakan. Hal itu bisa dilihat dari polemik kebudayaan 1 (Miharja; 1977), yang menurut banyak ahli dalam polemik tersebut dimenangkan oleh pemikiran Sutan Takdir Alisyahbana (STA). Pemikiran itu kemudian diteruskan oleh *Surat Kepercayaan Gelanggang* yang mengukuhkan pandangan STA, dengan mengatakan “Kami adalah ahli waris dunia yang sah dari kebudayaan dunia.....”. Keberpihakan pada Barat itu dapat dilihat dalam perkembangan Indonesia. (Lihat juga pengantar Esten dalam *Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia Yang Relevan*, 1988)

Dalam buku yang dieditori Mursal Esten tersebut terdapat beberapa tulisan lain seperti tulisan Subagio Sastrawardoyo yang berjudul “Mencari Jejak Teori

Sastra Sendiri”; tulisan Achadiati Ikram berjudul “Telaah Sastra Nusantara: Ke Arah Pendekatan yang Bermanfaat”; Tulisan Rachmat Djoko Pardopo yang berjudul “Menuju Poetika dan Kritik Sastra yang Berwatak Indonesia”; dan tulisan Faruk yang berjudul “Novel Indonesia Mutakhir: Menujut Teori yang Relevan”. Artinya, pembicaraan yang berkaitan dengan upaya mencari sesuatu yang “kontekstual Indonesia” bukanlah hal baru. Diskusi persoalan mencari teori sastra yang sesuai kebutuhan Indonesia tersebut juga sempat ramai di harian *Kompas* pada tahun-tahun tersebut.

Saya ingin menggarisbawasi asas kebermanfaatan yang diwacanakan Ikram, dan kemungkinan teori yang relevan yang ditawarkan Faruk. Asas kebermanfaatan sangat penting bagi inspirasi teoretik untuk “membangun kembali” teori yang relevan. Relevan bagi kebutuhan kita sebagai bangsa yang, kita tahu, masih mengalami banyak ketidakharmonisan. Tentu, seperti halnya beberapa konsep yang dibicarakan kemudian, saya menggunakan kata-kata tertentu dalam kiatan **pertimbangan teoretis**, hanya sebagai inspirasi teroretik, dengan penggunaan yang sama sekali berbeda.

Pada dekade itu juga muncul perdebatan yang mempersoalkan kembali jejak-jejak teoretik sastra (dan budaya) Indonesia dengan apa yang kemudian disebut sebagai sastra kontekstual (Heryanto; 1985). Perdebatan tersebut muncul dari berbagai dealektika teoretik yang berkembang pada waktu itu, termasuk teori-teori sosial dari Amerika Latin.

Pada aras karya sastra, pada waktu itu juga memperlihatkan bangkitnya apa yang kemudian disebut sebagai warna lokal. Pada gilirannya, hal yang cukup banyak disepakati adalah bahwa baik teori maupun karya sastra merupakan suatu proses dealektis dari berbagai pengaruh, baik lokal dan global. Kesepakatan itu akhirnya berjalan sendiri-sendiri tanpa titik temu yang perlu direkomendasikan sebagai sesuatu yang penting untuk diteruskan.

Kelemahan mendasar dari berbagai gagasan mencari teori yang relevan tersebut adalah bahwa para pengembang teori pada waktu itu tidak memberikan pegangan yang, baik secara historis maupun ideologis, telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Hal yang saya maksud adalah UUD '45 dan Pancasila. Saya tahu bahwa gagasan ini terkesan riskan dan akan menimbulkan banyak penolakan karena hingga hari ini bahkan masih banyak persoalan bahwa, terutama Pancasila, bukan sesuatu yang sukses menjadi pegangan ideologis bangsa Indonesia. Namun, kita harus mengakui bahwa secara yuridis, ideologis, dan historis, UUD '45 dan Pancasila lah yang sah kita miliki secara bersama; dan sekaligus yang menyebabkan bangsa Indonesia ada dan bertahan hingga kini.

Kelemahan kedua dari pencarian teori yang dibicarakan di atas adalah bahwa berbagai upaya tersebut lebih menekankan pada struktur intelektual dan/atau intelegensi semata. Eksplorasi tersebut berjalan dalam bayang-bayang modernisasi/modernisme dan kapitalisme. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika polemik tersebut terasa pincang dan berat sebelah, dan tidak mempertimbangkan bahwa terdapat dimensi-dimensi lain, seharusnya, yang perlu dipertimbangkan, yakni dimensi spritualitas dan emosionalitas.

Perdebatan panjang soal kebudayaan, termasuk di dalamnya persoalan sastra, akhirnya berjalan secara tiarap dan tidak percaya diri. Hal yang ingin digarisbawahi adalah adanya persoalan dikotomis untuk mencoba mengejar kemajuan Barat; atau keberpihakan pada kemandirian diri sendiri. Dalam konteks dan posisi inilah relevansi teori harmoni-konstitusi memberikan alur yang sama pada keberpihakan kemandirian.

Perlu pula diingat bahwa terjadi perdebatan yang senada, dengan substansi yang berbeda, pada tahun 1980-an akhir antara Ignas Kleden dan beberapa akademisi lain. Pada tahun-tahun itu, pertanyaan besar yang ingin dijawab adalah apakah kebudayaan mempengaruhi ideologi atau ideologi yang mempengaruhi kebudayaan. Walaupun dalam dunia pemikiran dan akademis perdebatan tersebut

juga bukan hal baru, tetapi seingat saya ada semacam pengakuan bahwa ideologi cukup penting dalam mempengaruhi kebudayaan.

Jauh sebelumnya, Samuelson (1947) menggarisbawahi bahwa tanpa disadari hampir semua pemikiran Barat yang menjadi klasik pada awalnya berkembang karena pengaruh agama, atau ide-ide atau “ideologi” yang menjadi substansi penting dari ajaran agama tersebut. Artinya, banyak agama terbukti berpengaruh atau sedikit banyak memberikan determinasi terhadap kebudayaan manusia pada masa-masa berikutnya. Saya kira beberapa kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut ada benarnya.

PEMBAHASAN

Teori Harmoni Berbasis Konstitusi

Berdasarkan pengantar di atas, tulisan ini mencoba memperlihatkan suatu teori yang disebut teori harmoni-konstitusi. Pada awalnya, teori ini saya sebut sebagai teori konstitusi. Pemilihan konstitusi secara umum dimaksudkan sebagai aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun lisan, yang disepakati suatu negara atau oleh masyarakatnya. Sumber paradigmatik dan konseptual teori ini sepenuhnya berdasarkan dan bersandar pada Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, seharusnya, teori yang berbasis konstitusi “mengikat” warga Indonesia untuk dipraktikkan dan direalisasikan. Akan tetapi, seperti dijelaskan kemudian, substansi terpenting dari gagasan konstitusional tersebut adalah terjadinya atau terwujudnya harmoni.

Secara umum, teori ini bisa dipakai untuk menganalisis persoalan sosial dan budaya, tetapi dalam kasus tulisan ini akan diujikan untuk mengkaji karya sastra (dalam kasus ini puisi). Untuk itu dikutipkan pembukaan UUD 1945 tersebut.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita tahu bahwa para perumus pembukaan UUD ini adalah mereka orang Indonesia yang terpelajar, yang juga sangat terpengaruh pada pemikiran Barat. Akan tetapi, terlihat bahwa beberapa konsep dasar yang dikembangkan dalam pembukaan tersebut, seperti akan dibicarakan kemudian, memberikan satu konsep keseimbangan yang harmonis. Sangat mungkin hal tersebut menyebabkan konstitusi kita, merupakan pijakan dan landasan yang sangat kokoh dan mendasar.

Latar Belakang Pilihan Basis

Negara, bangsa, dan kondisi Indonesia, semakin hari semakin memperlihatkan gejala menguatnya kapitalisme, modernisme (westernisasi), dan sekularisme. Sudah banyak bukti bahwa di berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai tempat di Indonesia, gejala modernisasi dan kooptasi kapitalisme,

semakin berjalan tak terkontrol dan tak terarah. Tidak terkontrol dalam pengertian kapitalisme berjalan tanpa mendapat perlawanan yang seimbang sehingga ketidakadilan ekonomi terjadi di mana-mana. Secara struktur, ekonomi yang kuat bertambah kuat dan yang lemah bertambah lemah.

Perlawanan biasanya bersifat reaktif, bahkan sebagian di antaranya dengan kekerasan yang justru membawa aib tersendiri. Dalam konteks ini, Indonesia menuju ke satu arah yang semakin menjauh dari tradisi keindonesiaannya. Ruang harmoni semakin kecil. Saat ini banyak terjadi ketidakadilan ekonomi dan politik, manipulasi dan kebohongan, karena tujuan keuntungan/kapitalisasi ekonomi menghalalkan segala cara. Sebagai akibatnya, kita hidup dalam satu zaman penuh kecemasan, tidak tahu berjalan ke arah mana janji modernisasi, kapitalisme, dan sekularisme tersebut.

Padahal, di negara maju (Barat) sendiri, seperti di Amerika dan sejumlah negara maju di Eropa, para pemikir kelas beratnya, seperti Paul Krugman dan Joseph E. Stiglitz (peraih hadiah nobel ekonomi 2008 dan 2001) telah memperlihatkan kegagalan Amerika dalam membangun perekonomiannya, justru ketika Amerika terlihat baik secara ekonomi, tetapi rapuh secara sosial dan budaya. Negara Amerika bahkan dinobatkan sebagai negara paling berbahaya di dunia. Pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai kekerasan lainnya paling banyak terjadi di Amerika.

Ujungnya, kedua pemikir tersebut mendorong negara di dunia untuk menolak sekularisme dan mempertahankan, atau kembali, pada sesuatu nilai yang seimbang (harmoni) antara yang spritual, emosional, dan intelektual (dan intelegensi). Padahal, di sini yang lain, walaupun kita tidak mengakuinya, kita bermimpi menjadi negara maju seperti Amerika, atau negara maju Eropa lainnya. Memang, kita tidak menolak kenyataan bahwa, di sisi lain, Amerika merupakan negara terkuat di dunia. Namun, sebagai negara terkuat di dunia, Amerika tidak mampu menjamin keamanan dan kebahagiaan warganya sendiri.

Artinya, perlu suatu “strategi alternatif”, untuk menyelamatkan masa depan dunia, bukan hanya Indonesia. Strategi itu bisa pada level konsep (teori), tetapi yang lebih penting adalah pada level aksi/tindakan. Akan tetapi, tentu saja suatu aksi/tindakan tertentu, perlu didukung oleh satu teori yang memadai, suatu teori yang mengarahkan pada satu “bayangan ideal/akhir, dunia (khususnya Indonesia) seperti apa yang dibayangkan bisa direalisasikan.

Berdasarkan dan berlandaskan pembukaan UUD 1945 tersebut, ada beberapa konsep penting yang menjadi ujung bagaimana Indonesia dibayangkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa Kita, yakni konsep-konsep kemerdekaan, bebas penjajahan, perikemanusiaan, perikeadilan, berbahagia, selamat sentosa, bersatu, berdaulat, adil, makmur, atas berkat Allah, keinginan luhur, bangsa yang bebas, merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum, mencerdaskan, ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata atau konsep merdeka, kemerdekaan, paling banyak disebut. Itu artinya konsep/kata tersebut salah satu yang paling penting. Kata/konsep kedua yang juga sangat penting adalah keadilan (sosial). Kata/konsep lain disebut relatif berimbang. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa konsep/kata yang disusun dalam Pembukaan UUD tersebut merupakan sesuatu yang terpadu dan koheren sehingga saling membutuhkan dan menjelaskan.

Berdasarkan alur historis dan pengalaman kita bersama sebagai warga Indonesia, kata/konsep yang telah disebutkan dalam pembukaan tersebut telah menjadi “pengetahuan kita bersama”, sehingga sebetulnya tidak ada hal yang baru. Persoalannya adalah mengapa hampir seluruh mimpi para pendahulu kita, yang sudah dikonsepsikan sedemikian matang dalam Pembukaan tersebut, secara

kenyataan, kalau kita boleh jujur, tidak banyak yang bisa kita raih. Walaupun di beberapa hal ada perkembangan, tetapi perkembangan tersebut masih jauh dari apa yang telah dikonsepsikan dalam Pembukaan UUD tersebut.

Itulah sebabnya, kita perlu memperbarui paradigma dan konsep-konsep sehingga ada sinergi yang kuat dan kompak dalam cara pandang kita mengatasi berbagai persoalan bangsa. Dari pernyataan dalam pembukaan tersebut, hal pertama yang harus digarisbawahi dan kembali diperjuangkan adalah persoalan nilai; nilai kemerdekaan, nilai keadilan, nilai ketuhanan, nilai kemakmuran, nilai keluhuran, nilai kemanusiaan, dan sebagainya. Artinya, nilai inilah yang menjadi kontrol derivatif untuk instrumentasi, operasionalisasi, dan berbagai prosedur metodologis dalam menganalisis berbagai masalah.

Pertimbangan Teoretik

Teori-teori sosial, budaya, dan khususnya sastra, telah berkembang secara beragam sesuai dengan tujuan dan paradigmanya masing-masing. Walaupun tulisan ini belum secara memadai menjelaskan apa itu teori harmoni-konstitusi, tetapi perlu gambaran umum pertimbangan teoretis terhadap teori-teori tersebut.

Dalam pembicaraan ini, teori realisme magis memberikan inspirasi pada analisis derajat cara pandang kerealismean atau kemagisan sebuah teks. Teks dengan cara pandang realis dianggap modern dan “sekuler”, dan teks yang memberikan cara pandang magis memberikan posisi pada sesuatu yang bersifat mitos, memgerikan tempat pada kekuatan alam, kekuatan supernatural. Lima instrumen yang dikembangkan Faris (2004), yakni *the irreducible element* (elemen tak tereduksi) sesuatu yang tak bisa dipahami berdasarkan logika modern, peristiwa magis, aneh; *phenomenal world* (dunia fenomenal); *unsettling doubts* (keraguan yang meresahkan); *merging realms* (dunia yang dilebur); *disruptions of time, space, identity* (gangguan waktu, ruang, dan identitas), layak untuk dicermati lebih jauh.

Teori realisme magis cukup kompleks dalam cara menganalisis, tetapi relatif tidak rumit pada tujuan analisis. Hal yang bisa “diadopsi” dari teori realisme magis adalah upaya mencari titik ketidakseimbangan antara keberadaan realisme dan magisme, utamanya dalam karya sastra. Jika realisme magis berupaya mencari titik ketidakseimbangan antara realime dan magisme, maka teori harmoni-konstitusi justru mencari atau menjelaskan keseimbangan dan ketidakseimbangan antara spritualistas, emosionalitas, dan intelektualitas.

Teori-teori sosiologi sastra, khususnya yang berkaitan dengan ideologi, seperti dikembangkan Gramsci, Ahthusser, F. Jameson, Goldmann, Terry Eagleton sangat membantu untuk menjelaskan ideologi teks dan pengarang atas berbagai diterminasi (sosial, ekonomi, dan politik) yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Teori hegemoni Gramsci sangat penting dan menjadi landasan penting bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat. Teori Jameson, misalnya, sangat tajam membongkar tiga lapis ideologis sebuah teks sastra. Konsep sastra sebagai mediasi pandangan dunia, seperti dikembangkan Goldmann, juga penting dipahami.

Dalam posisi yang sedikit berbeda, teori yang dikembangkan oleh Bourdieu memberikan kesamaan pada persoalan legitimasi. Akan tetapi, persoalan legitimasi ini dalam teori harmoni-konstitusi mengarah pada konteks keseimbangan nilai. Teori-teori fungsionalisme, semisal Talcot Parson, ikut memberikan kesamaan pertanyaan terhadap fungsi-fungsi keberintahan lembaga-lembaga, khususnya lembaga kesastraan. (Beberapa buku yang dijadikan referensi dalam pembicaraan paragraf ini ditulis dalam daftar pustaka).

Catherine Gallagher dan Green Blatt (2000) dengan paradigma historisme baru, juga memberikan inspirasi pada berbagai upaya kajian sastra untuk menjelaskan proses dan mekanisme sastra sebagai medan dan ajang rekonsiliasi berbagai pertentangan politik. Hal yang perlu digarisbawahi adalah ide rekonsiliasi itu sendiri, yang dalam hal tulisan ini dimaksudkan sebagai salah

satu upaya rekonsiliasi teoretik. Keragaman teori memberikan ide dan tujuan analisis yang berbeda, sehingga upaya rekonsiliasi teoretik diperlukan sebagai jalan tengah dan diharapkan membantu menjawab berbagai persoalan, khususnya untuk kajian sastra Indonesia.

Kritisisme pemikiran Frankfurt, seperti dikembangkan Adorno, Horkheimer, Marcuse, hingga Habermas, sangat mendukung teori harmoni-konstitusi atas penolakannya pada dominasi kapitalisme dan modernisme yang telah membawa manusia sebagai makhluk satu dimensi. Teori kritis Frankfurt juga menarik karena teori ini bersikap tegas sekaligus keberpihakannya pada upaya kembali memanusiakan manusia, dan sangat menolak jika seni dan sastra menjadi komoditas seperti yang terjadi dalam dunia kapitalisme.

Teori-teori psikoanalisis memberikan kesamaan pada pembongkaran aspek kesejarahan dan pengalaman subjek. Teori-teori poststrukturalisme juga memberikan kebebasan pada batas-batas yang telah menyekat klaim universalisme, atau di sisi lain, adanya upaya pengembalian terhadap pentingnya narasi-narasi “kecil”, atau dalam hal ini saya sebut sebagai narasi-narasi lokal. Sementara itu, teori-teori feminisme memiliki kesamaan pada ide-ide kesederajatan dan keadilan. Belakangan ini teori ekofeminisme, seperti dikembangkan oleh Shiva (1988), juga memberikan inspirasi pada pentingnya “kembali ke alam”. Shiva telah dengan jernih membongkar dominasi dan hegemoni kapitalisme berdasarkan kasus gerakan moral dan budaya wanita di India.

Teori-teori poskolonial telah membantu kita dalam membangun kewacanaan untuk memberi ruang keberpihakan pada kepentingan “pribumi” (pengalaman bangsa terjajah). Teori historisisme baru seperti yang dikembangkan oleh Green Blatt memberikan inspirasi pada apa yang saya sebut sebagai upaya rekonsiliasi terhadap perjalanan sejarah (Indonesia) yang kusam. Di lain sisi, teori-teori

naratif, terutama yang dikembangkan oleh Chatman sangat penting sebagai satu strategi dalam menganalisis teks.

Secara metodologi, teori semiotik dan teori-teori kewacanaan sangat membantu dalam sistem penandaan teks dan/atau membongkar teks dengan prosedur yang bersifat linguistik. Artinya, teori semiotik dan kewacanaan secara metodologis merupakan sarana atau instrumen penting dalam teori harmoni-konstitusi. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian metodologi.

Formulasi Teori

Berdasarkan Pembukaan UUD, hal utama dan pertama yang menjadi tujuan penting dari cara pandang teoretik teori harmoni-konstitusi adalah segala upaya membangun masyarakat yang merdeka dan berkeadilan sosial. Artinya, untuk menganalisis karya sastra pertimbangan untuk membuktikan apakah karya tersebut memiliki “ideologi”, atau keberpihakan, atau mendorong, atau mempertanyakan, prinsip kemerdekaan atau pemerdekaan dan keadilan sosial menjadi sangat penting.

Persoalan kedua yang menjadi poros teori harmoni-konstitusi adalah kondisi berbahagia dan selamat sentosa, dan dengan itu kemerdekaan yang telah diraih selayaknya selalu mendorong persatuan, kedaulatan, dan kemakmuran. Dalam situasi ini, saya juga ingin meletakkan poros tersebut sebagai bagian dari tujuan keberadaan karya sastra. Banyak karya sastra yang agung dan besar, ditulis karena kekecewaan, kegelisahan, atau bahkan kemarahan terhadap kehidupan yang semakin tidak membahagiakan, kehidupan yang semakin membuat manusia menjadi mesin-mesin. Artinya, tujuan dari karya yang besar itu adalah juga mencari kebahagiaan yang telah hilang.

Konsep persatuan, atau saya ingin mengatakan sebagai kekompakan, tentu juga penting. Kesatuan/kekompakan dalam perbedaan dan keragaman. Hal yang ingin disampaikan adalah karya sastra juga perlu mendorong kekompakan agar

tidak terjadi terus menerus konflik, kerusuhan, perseteruan, kriminalitas, dan perang yang menimbulkan berbagai kekerasan, baik atas nama SARA, ataupun berbagai masalah ekonomi dan politik lainnya. Karya sastra Indonesia termasuk yang cukup kritis terhadap fenomena kekerasan dan ketidakadilan dalam konteks tersebut. Bahkan boleh dikata bahwa secara historis sastra Indonesia bisalah ditempatkan sebagai sastra perlawanan.

Hal ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah pengakuan “Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur.” Inilah salah satu substansi penting dari teori harmoni-konstitusi, yakni pengakuan atas berkat Allah Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur. Artinya, teori konstitusi secara eksplisit ingin mengatakan penghargaan pada sastra yang tidak sekuler. Teori-teori Marxist, dan berbagai varian turunannya, memang terbukti canggih dalam menganalisis berbagai proses dan pengekelasan sosial. Akan tetapi, teori Marxist tidak mampu menjawab sepenuhnya ketika semua prosedur dan sistem dipenuhi, tetapi ternyata masyarakat yang dibayangkan tidak bisa seperti yang dimaksud dan dituju oleh teori tersebut.

Konsep keinginan luhur merupakan salah satu konsep yang penting. Luhur atau mulia, bisa dikembangkan menjadi keluhuran (kemuliaan), dan leluhur (nenek moyang/tradisi yang telah diwariskan). Dengan demikian, teori harmoni-konstitusi juga mempersoalkan apakah karya sastra tersebut mencoba memberikan dorongan atau keberpihakan terhadap keluhuran dan leluhur. Artinya, dengan demikian, pengkaji sastra yang ingin menggunakan teori konstitusi juga perlu mengetahui tradisi-tradisi, nilai-nilai, dan hal-hal simbolik budaya nusantara.

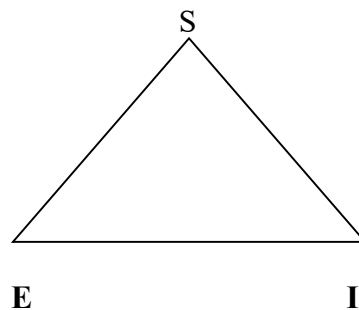
Di samping itu, seperti tertera dalam Pembukaan UUD tersebut, teori konstitusi juga mendorong karya sastra yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Dalam konteks ini, saya ingin menggarisbawahi konsep melindungi (dalam berbagai hal), memajukan kesejahteraan umum, dan yang paling penting adalah sastra yang mencerdaskan. Sastra juga perlu membantu menciptakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Saya sedikit mengelaborasi soal sastra yang mencerdaskan. Kita tahu, bahwa banyak karya sastra yang mengumbar kepuasan sesaat (biasanya sastra pop yang berorientasi pada pasar), pembaca menjadi senang dan sangat terhibur, tetapi masyarakat pembaca secara relatif tidak mendapat pengetahuan penting dan pengalaman yang diumbar sastra pop tersebut juga palsu. Dalam konteks yang lain sisnetron (dalam sisi tertentu bisa juga disebut sastra sinema) juga telah membuang waktu banyak masyarakat Indonesia, dan kita tidak bertambah pengetahuan dan kecerdasan kita dengan mengonsumsi karya sastra (sinema) tersebut.

Poros kunci dari teori harmoni-konstitusi, seperti tertulis dalam Pembukaan, tentulah nilai-nilai ideologis seperti yang terdapat dalam Pancasila. Bagi teori harmoni-konstitusi, hal ini menjadi landasan utama dan penting dalam mengelaborasi dan menganalisis berbagai persoalan, khususnya fenomena kesusastraan.

Jika menilik ulang pembukaan UUD tersebut, maka porsi terbesar gagasan terletak pada nilai. Saya ingin membagi teks pembukaan UUD tersebut dalam segi tiga (sama sisi) nilai yang seimbang (harmoni).



Berikut penjelasannya. S, spritualitas, meliputi pengertian pengakuan terhadap kekuasaan dan keberadaan Allah (atas berkat Rahmat Allah). Dismensi spritualitas berimplikasi pada kontrol atau tujuan perjalanan hidup kita ke depan; apa sudah benar atau belum. Hal ini penting berkaitan dengan keyakinan diri (dan keluarga, masyarakat, bangsa, manusia sedunia), tentang keberadaan kita di dunia/bumi. Kita tahu bahwa banyak teori atau hal-hal yang bersifat akademis relatif mengabaikan keberadaan dan kekuatan spritualitas ini. Perdebatan tentang hal ini telah terlalu panjang untuk mengatakan bahwa dimensi keyakinan dianggap tidak ilmiah.

Sementara itu, E, emosi/perasaan, atau segala hal yang berkaitan dengan dunia perasaan, sesuatu yang bersifat “psikologis”, berkaitan dengan dimensi pemahaman dan perasaan bersama, meliputi konsep atau pengertian kemerdekaan, keadilan (sosial), kemakmuran, berbahagia (kebahagiaan, selamat sentosa, kemakmuran, dan kebebasan. Dimensi emosi, sesuatu yang dipersepsi sebagai “perasaan bersama” tentu sangat sulit dijelaskan. Hal tersebut bisa dibantu berdasarkan kondisi eksternal, suatu perhitungan atau kajian yang bersifat kuantitatif, yang dikaji secara bertanggung jawab.

Akan tetapi, hal kuantitatif pun tidak sepenuhnya bisa menjelaskan kondisi emosional dalam merasakan hal-hal yang meliputi perasaan merdeka, adil, makmur, bahagia, dan bebas. Kita mengenal banyak indeks-indeks, tapi kadang kita juga meragukannya. Terdapat sejumlah perasaan yang kadang kita tidak pernah puas dengan indeksisasi tersebut. Hal-hal yang bersifat perasaan aman, perasaan soal keadilan ekonomi/rezeki, dan sebagainya, sering menjadi kegalauan bersama.

Dalam konteks inilah saya memasukkan konsep harmoni, atau mengupayakan terjadinya proses-proses harmonisasi terus menerus. Dalam hal ini saya membayangkan musik tradisional kerawitan/gamelan, bukan orkestra. Orkestra pemimpinnya di luar, tidak menjadi bagian dari satu sistem musik seperti

gamelan/kerawitan. Sementara itu, kerawitan/gamelan pemimpinnya ada di dalam, menjadi bagian dari pengrawit/*nayaga*/ masyarakat. Setiap pengrawit tahu posisi dan tugasnya masing-masing, saling mengisi, saling melengkapi, sesuai dengan tanggungjawab dan posisinya. Harmoni terjadi ketika ada kerja sama, perasaan bertanggung jawab bersama, sesuai dengan tugas dan posisinya masing-masing. Ini bukan persoalan “takdir”, tetapi soal kesadaran bersama, bahwa manusia dilahirkan secara berbeda, dan memiliki jalur hidup yang berbeda.

I, intelegensi dan/atau intelektual, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kecerdasan, pencerdasan. Hal ini berkaitan langsung dengan dunia pendidikan dan kependidikan, juga berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat keintelektualan. Kita tidak berbicara bahwa ada manusia yang mungkin tidak pintar dan ada yang pintar. Kita berbicara tentang capaian masyarakat berkaitan dengan hal (kualitas) pemikiran, hal akademis, hal-hal keterpelajaran, dan hal-hal invensi lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup. Hal capaian intelektual/akademis itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melindungi/menjaga ketertiban dan keamanan dunia.

Dengan demikian, salah satu tujuan penting kajian berdasarkan teori konstitusi adalah meneliti/menganalisis derajat keseimbangan harmonis dimensi spritualitas, emosionalitas, dan intelektualitas/intelegensi. Jika salah satu aspek dari dimensi tersebut dianggap dominan, maka, dalam konteks ini karya sastra, dianggap tidak harmonis. Implikasinya, karya tersebut tidak memosisikan dirinya ikut mendorong atau mengondisikan dalam tujuan-tujuan menciptakan masyarakat yang baik (dan harmonis).

Metodologi

Secara metodologi teori harmoni-konstitusi berbasis pada semantik. Dalam hal ini semantik yang berpegang pada tiga hal yakni nilai dan/atau filosofi, psikologi, dan linguistik. Seperti dikatakan Lehrer (Lehrer; 1974: 1) semantik

adalah studi tentang makna. Pengertian tersebut tentu saja sangat luas, tetapi Lehrer menekankan kaitan kajian semantik yang juga mempersoalkan aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga sangat berhubungan dengan psikologi, filsafat, antropologi, dan tentu saja terutama linguistik. Beberapa ahli lain juga mengatakan bahwa semantik, sebagai teori tentang penfasiran dalam rangka menemukan makna di balik tanda-tanda kebahasaan, maka semantik juga sangat erat kaitannya dengan semiotik.

Dalam pembicaraan ini, saya mengambil beberapa hal dari Barthes tentang semiotik. Gagasan yang penting adalah konsepnya tentang ‘*order of signification*’, yang mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu ‘mitos’ yang menandai suatu masyarakat. Menurutnya, mitos terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuknya sistem *sign-signifier-signified*, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Ketika suatu tanda memiliki makna konotasi yang kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos.

Mitos tidak menunjuk pada mitologi dalam pengertian sehari-hari – seperti halnya cerita-cerita tradisional – melainkan sebuah cara pemakaian, atau ‘tipe wicara’. Menurutnya mitos berada pada wilayah pertandaan tingkat kedua, atau tingkat konotasi bahasa dan konotasi itu dijadikan olehnya sebagai denotasi mitos dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu. Konotasi merupakan aspek bentuk bahasa dan mitos adalah muatannya. Barthes mengatakan bahwa penggunaan konotasi dalam teks sebagai penciptaan mitos. Teori Barthes tentang mitos ini memungkinkan pembaca atau analis untuk mengkaji ideologi secara sinkronik ataupun diakronik. Secara sinkronik, makna terhampiri pada suatu titik sejarah dan seolah berhenti di titik tersebut. Sementara itu, hampiran diakronik analisis Barthes memungkinkan untuk melihat kapan, di

mana, dan dalam lingkungan apa sebuah sistem mitos digunakan, atau apa yang disebut sebagai konteks.

Seperti telah disinggung, fakta-fakta yang menjadi bahan kajian sastra (dan kebahasaan) adalah bahasa verbal yang dapat ditemukan dalam berbagai karya sastra yang menjadi objek material penelitian. Fakta kebahasaan tersebut di validasi dan diverifikasi sehingga menjadi data yang dapat di analisis.

Cara analisis data, seperti juga telah disinggung, secara serempak strategi analisis wacana sangat bermanfaat, terutama dalam “membongkar” hal-hal di balik data verbal yang telah didapatkan. Dalam kesempatan ini, saya hanya akan mengambil teori analisis wacana seperti dikembangkan oleh Fairclough yang dikenal sebagai analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis* atau disingkat CDA). Tujuan analisis wacana adalah untuk "mengeksplorasi kekuatan tersembunyi hubungan antara sepotong wacana dan formasi sosial dan budaya yang lebih luas" dan memiliki ketertarikan untuk "mengungkap hubungan ketidaksetaraan, kekuasaan, ketidakadilan, diskriminasi, bias, dan sebagainya". Sifat pekerjaan wacana kritis akan menunjukkan niat pengkaji untuk mengungkap hubungan kekuasaan dan menunjukkan ketidakadilan yang tertanam di masyarakat. Dalam kerangka ini, pengkaji mungkin percaya bahwa pengungkapan hubungan kekuasaan dalam analisisnya punya kecenderungan bisa mengganggu hubungan kekuasaan dalam konteks sosialnya.

Pengertian kata “kritis” pada analisis wacana kritis adalah niat mengeksplorasi sistem makna yang terkait dengan praktik-praktik sosial secara khusus dalam bentuk kuasa dan bahasa. Diungkapkan oleh Chouliaraki dan Fairclough (1999), bahwa tingkat kritis dalam analisis wacana berupa pencermatan terhadap hubungan antara wacana tertentu dan posisi sosial yang ‘mungkin’ ditetapkan oleh efek ideologis wacana serta dinegosiasikan melalui proses praktik artikulasi. Perspektif ‘kritis’nya terletak pada niat menganalisis

bagaimana jaringan pola wacana masalah aksi sosial dan politik. Bagaimana wacana beroperasi secara historis untuk membangun isu-isu sosial.

Fairclough (2003), “Wacana bagi saya, lebih dari sekedar penggunaan bahasa, apakah pembicaraan atau menulis, itu sebagai jenis praktik sosial”. Wacana dalam kerangka CDA memiliki relasi dengan perkembangan Linguistik Kritis (*Critical Linguistic*) dan Linguistik Fungsional Sistemik, yakni pada gagasan bahwa bahasa merespons fungsi penggunaan bahasa serta memiliki aksi yang berbeda (atau fungsi). Dalam disiplin linguistik kritis, wacana dipandang sebagai sistem makna atau pernyataan sistematis dan terorganisir yang memberikan ekspresi makna dan nilai-nilai yang melembaga.

Berdasarkan atas tiga dimensi analisis wacana kritisnya itu, Fairclough memulai pada analisis tingkat teks, yakni: (1) Representasi, bagaimana ‘sesuatu’ ditampilkan dalam teks; (2) Relasi, bagaimana hubungan antara produsen teks dan masyarakat ditampilkan dalam teks; (3) Identitas, bagaimana identitas produsen teks dan masyarakat ditampilkan dalam teks. Pada tingkat analisis teks ini cenderung analisis formalistik. Dimensi ke dua adalah tindakan komunikasi sebagai sebuah proses produksi dan konsumsi dari teks wacana. Di tingkat ini, fokus analisis adalah menjawab bagaimana sebuah teks merujuk atau memanfaatkan wacana-wacana lain dalam produksinya serta bagaimana proses konsumsinya. Tingkat ini bisa disebut pula tingkat yang memasalahkan ‘intertekstualitas’. Dimensi ke tiga adalah ‘Praktik Sosial’, memperhatikan bagaimana sistem sosial, ekonomi, politik bekerja sehingga membangun praktik sosial sebagai implikasi wacana.

Kasus Puisi Chairil Anwar

Dalam kesempatan ini saya memilih puisi yang paling populer di Indonesia, yakni puisi “Aku” karya Chairil Anwar. Saya menduga sebagian dari kita bahkan mungkin cukup hapal dengan puisi ini. Chairil Anwar merupakan pelopor puisi

modern Indonesia dan, katanya, masih merupakan salah satu penyair terbaik Indonesia. Pembicaraan dan analisis di sini bersifat pengantar dan tidak detil.

Aku

Kalau sampai waktuku
'Ku mau tak seorang 'kan merayu
Tidak juga kau

Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbang

Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri

Dan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi

Kajian terhadap puisi C. Anwar sudah cukup banyak dilakukan. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah “terobosan teknis” struktur puisinya yang relatif baru pada masanya. Secara kontekstual, puisi itu ditulis ketika Indonesia masih dalam masa perjuangan, sekitar tahun 1945. Tahun-tahun itu bangsa Indonesia sedang belajar untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang dan berusaha merdeka, berusaha bebas dari penjajahan. Situasi itu dengan baik direkam oleh Anwar dalam puisi “Aku”.

Kalau sampai waktuku, 'Ku mau tak seorang 'kan merayu artinya, jika tiba saatnya, aku ingin tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa merayu, menggodaku, bahkan dengan *iming-iming* apapun. Bisa juga diartikan, janganlah lagi ada seseorang atau siapapun yang merayu/menggoda dengan *iming-iming* apapun. Hal itu dikarenakan aku tak akan pernah menyerah lagi terhadap

segala rayuan atau godaan *kau*. Bait/frase *kalau sampai waktuku*, seperti akan dijelaskan kemudian, masih meninggalkan pertanyaan, siapa yang menentukan waktunya.

Hal yang menjadi masalah adalah siapa *kau* itu? *Kau* di sini bisa saja musuh perjuangan, penjajah, bisa juga perempuan (karena Anwar laki-laki). Akan tetapi, mengingat bait berikutnya, *tak perlu sedu sedan itu*, sangat mungkin yang dimaksud *kau* adalah seorang kekasih yang, jika membujuk aku untuk berhenti berjuang/perang, dengan resiko mati, maka aku tak mau dihentikan untuk berjuang. Dalam prosesnya, karena tekanan hidup dalam penjajahan dan kemiskinan, si aku merasa dirinya tidak menjadi manusia normal lagi. Ia merasa aku ini *binatang jalang*. Bahkan karena merasa tertekan, terjajah, tertindas, ia memproklamirkan dirinya sebagai *jalang*, sesuatu yang penuh kebebasan. Kebebasan itu bahkan diekstrimkan dengan *dari kumpulan* binatang itu, ia sosok yang *terbuang*.

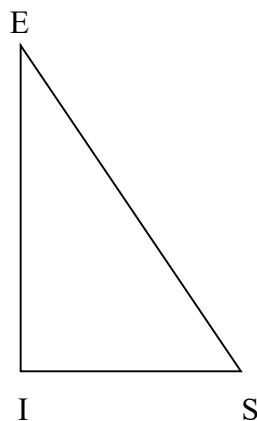
Sebagai sesuatu yang *jalang* dan *terbuang*, maka ia mendapatkan kebebasan, bebas dari norma dan aturan kehidupan yang normatif. Dari situ kelihatan Anwar dipengaruhi sesuatu yang bersifat individualisme. Berdasarkan instrumen yang dikembangkan Faris, maka terlihat puisi ini lebih berperspektif rasional. Rasionalismenya tampak ketika ia mengatakan bahwa pilihan tidak normal, *jalang*, dan *terbuang* itu mengandung resiko *biar peluru menembus kulitku*, aku tak takut, *aku* akan *tetap meradang* dan *menerjang* keterjajahan dan belenggu yang menindasku. Dengan semangat individual dan rasionalnya, aku mengambil pilihan strategis, jika semua hal tidak teratasi, maka *luka dan bisa kubawa berlari/Berlari/ Hingga hilang pedih peri*

Sejauh ini, ditinjau dari aspek segitiga keseimbangan, aspek *e* (emosionalitas) puisi sangat menonjol. *Aku* tak tahan lagi dengan hal situasi yang tak adil, tak memberi ruang kebebasan, (dan “norma kolektif”). Keberadaan emosionalitas itu didukung dengan nilai lain (*i*) yang menjiwai puisi, yakni aspek

intelegensia, usaha perjuangan rasional untuk mendapatkan kebebasan. Persoalannya adalah bahwa nilai emosionalitas dan intelegensia itu akan di bawa ke mana, atau apa nilai yang memberi keseimbangan. Jawabannya adalah akan dibawa ke *Aku mau hidup seribu tahun lagi*.

Kita paham bahwa ungkapan *seribu tahun* itu untuk mengatakan sesuatu yang sangat lama. Manusia tidak mungkin bisa hidup seribu tahun. Artinya, hidup seribu tahun itu seolah abadi bagi manusia. Akan tetapi, sebutan *seribu tahun* itu masih tertentu dan tidak sama dengan keabadian. Ini membedakan jika puisi itu mengatakan *aku ingin hidup selamanya*, atau *aku ingin hidup abadi*. Kemungkinan kedua, Anwar, atau Aku, ingin namanya hidup seribu tahun lagi. Paling tidak hingga hari ini nama C. Anwar masih hidup di Indonesia (sudah 70 tahun lebih). Pertanyaannya, siapa yang bisa menentukan bahwa seseorang bisa hidup lama atau abadi. Kenapa Chairil Anwar tidak melibatnya aspek spritualitas, atau kekuasaan yang Maha Menentukan, atau atas berkat Allah yang Maha Kuasa.

Jika dibagikan, puisi ini adalah sebagai berikut.



Saya juga ingin mengatakan bahwa dalam puisi tersebut tidak menyimpan keinginan luhur, *dan aku akan lebih tidak peduli*, untuk melindungi segenap bangsa. Puisi ini juga tidak mengadung nilai permusyawarahan atau permufakakan. Aku mungkin seorang pejuang, tapi pejuang individual, yang ingin hidup seribu tahun, tapi entah untuk apa dan siapa, dan siapa yang bisa

menghidupkan seribu tahun. Puisi Anwar dalam perspektif teori ini terasa sangat pincang.

Jika kita menilik kehidupan dan latar belakang Anwar, dan kisah-kisah tentang dirinya, dapat diperkirakan bahwa Anwar merupakan seorang penyair yang berjuang keras untuk mendapatkan kebebasannya, mungkin kemerdekaan dan kebahagiaannya, dan jalan yang ditempuh lebih bersifat individual dan rasional. Akan tetapi, dia diperkirakan tidak cukup mempelajari sesuatu yang bersifat spritualitas, atau keberadaan Kekuasaan Tuhan yang lebih menentukan. Itulah sebabnya, dalam beberapa hal dia “mungkin” tidak mendapatkan keseimbangan dalam hidupnya, dan itu pula yang menyebabkan ia mendapatkan “kesulitan” dalam hidupnya. Anwar relatif meninggal diusia tidak cukup tua. Mungkin jika ia berumur lebih panjang, perjalanan hidup dan kepenyairannya akan berbeda. Dan siapa yang menentukan umurnya?

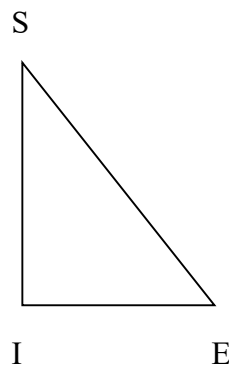
Dalam beberapa hal, kita perlu memaklumi situasi Indonesia pada masa itu. Pada masa itu C. Anwar itu, transisi kekuasaan masih berlangsung, kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masih karut-marut sehingga secara relatif bangsa Indonesia sedang dalam masa kegelisahan. Situasi gelisah dan transisi itu menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya Anwar, belum mendapatkan pegangan nilai yang pasti. Apalagi, polemik dan pemikiran kebudayaan, yang bernuansa politik dan sosial, belum memberikan pilihan-pilihan yang memadai bagi rakyat Indonesia. Dalam situasi itu, kita beruntung, para pendiri bangsa justru melegitimasi UUD '45 yang dimulai dengan klausul Pembukaan itu.

SIMPULAN

Di sejumlah negara maju dan modern, seperti juga telah disinyalir oleh sejumlah peneliti dan pengamat, nilai-nilai ekonomi (*pasar/market*) menjadi arus utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai pasar/ekonomi berkorelasi langsung terhadap sesuatu yang bersifat intelegensi/intelektualitas, dan secara

umum bersifat sekuler. Memang, di negara tersebut banyak kalkulasi yang rasional dan cerdas, memperlihatkan akurasi yang cukup berhasil dalam membangun dan mendorong kemajuan dan pembangunan. Akan tetapi, tidak sedikit dari sekian kalkulasi terhadap kehidupan, mereka memperlihatkan kegagalan, yakni masih banyaknya ketidakadilan, ketidakmakmuran, ketidakbebasan, ketidakmerdekaan, dan ketidakbahagiaan.

Saat ini, dunia berjalan dalam kondisi-kondisi tidak seimbang seperti itu. Tulisan ini tidak berpretensi untuk mengajak kita bersama menjadi seorang yang religius, atas lebih tepatnya seorang spritual. Jika penekanannya pada aspek tersebut, juga akan terjadi ketidakseimbangan, seolah kemudian hal-hal yang bersifat spritual akan menyelesaikan masalah. Dunia juga akan tidak stabil dan tidak harmonis jika semua hal bersifat spritual. Hal yang akan terjadi adalah sebagai bagan berikut.



Hal tersebut memberi isyarat bahwa karya sastra dengan semangat spritual yang berlebihan tidak berdampak signifikan terhadap proses-proses keseimbangan dalam tatanan kehidupan, jika itu dimaksudkan untuk tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecuali semangat spritualitas, atau semangat intelektualitas, dimaksudkan untuk pencapaian pribadi. Akan tetapi, itu tujuan pribadi. Karya sastra bukan sekadar persoalan pribadi. Karya sastra tasawuf/sufi mungkin penting atau menarik untuk solusi-solusi pribadi, tetapi tidak untuk nilai kebangsaan.

Karya kritik sosial yang sangat bersemangat secara intelektual, mungkin penting untuk kontrol nilai emosi dan spritual. Akan tetapi, karya sastra kritik sosial yang berlebihan karena kepentingan dan semangat individual dan emosional, tidak penting bagi nilai kebersamaan bangsa dan negara. Hal itu telah diperlihatkan oleh puisi “Aku” Chairil Anwar tersebut.

Karya sastra, kajian sastra, mungkin tidak untuk menyelesaikan banyak ketidakadilan, ketidakmakmuran, ketidakbahagiaan, dan sebagainya. Akan tetapi, teori harmoni-konstitusi diharapkan ikut mengepung, dan selalu mengingatkan, bahwa hidup kita masih (dan mungkin selalu) dalam ketidakadilan, ketidakmakmuran, dan ketidakbahagian. Hal itu berarti bahwa kita belum mampu menempatkan nilai-nilai dalam kehidupan kita secara seimbang dan harmoni.

DAFTAR RUJUKAN

- Barthes, Roland. 1972. *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa*. Jakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. England: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (terj. Yudi Santosa). Yogyakarta: Jalasutra.
- Chatman, Seymour. 2009. *Reading Narrative Fiction*. New York; Macmillan.
- Eagleton, Terry. 1976. *Marxis and Literary Criticism*. New York : Methuen & co.Ltd.
- Eagleton, Terry. 2001. *The Ideology of Asthetic*. Reprinted Oxford : Blackwell Publisher.
- Eagleton, Terry.1998. *Criticism and Ideology : a Study in Marxist Literary Theory*. New York : Verso.

- Esten, Mursal. 1988. *Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indoesia yang Relevan*. Bandung: Angkasa.
- Faris, Wendy B. 2004. *Ordinary Enchantments Magical Realism and the Remystification of Narrative*. Nashville; Vanderbilt University Press.
- Femia Yoseph, V. 1981. *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness and The Revolutionary Process*. Oxford: Clarendon Press.
- Gallagher, Catherine & Stephen Greenblatt. 2000. *Practicing New Historicism*. Chicago: The University of Chicago Press
- Goldmann, Lucien. 1977. *Towards a Sociology of the Novel*. London: Tavistock Publication Limited
- Greenblatt, Stephen. 1980. *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Greenblatt, Stephen. 2005. *The Greenblatt Reader*. Victoria: Blackwell Publishing.
- Heryanto, Ariel (ed.). 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lehrer, Adrienne. 1974. *Semantic Fileds dan Lexical Structure*. Amsterdam : North-Holland ; New York : American Elsevier.
- Miharja, Acahdiat K. 1977. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Norman Fairclough (1995). *Critical Discourse Analysis*. Harlow: Longman.
- Norman Fairclough (2001). *Language and Power* (2nd edition). Harlow: Longman.
- Norman Fairclough (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Parson, Talcott. 1991. *The Social System*. London: Routledge.
- Rimmon-Kenan, Shlomith. 1986. *Narrative Fiction Contemporary Poetics*. London and New York; Methuen.

Aprinus Salam, *Teori Harmoni: Pengantar Kajian Sastra...*(hlm. 1 - 27)

Salamini, L. 1981. *The Sociological of Political Praxis*. London: Routledge and Kegan Paul.

Shiva, Vandana. 1988. *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*. London; Zed Books.